

# PENGARUH PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, REGULASI, KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA INSTANSI DAERAH BANYUASIN

Tio Dimas Saputra<sup>1\*</sup>, Sarikadarwati<sup>2</sup>, Edwin Frymaruwah<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Politeknik Negeri Sriwijaya

\*E-mail: tiodimassaputra26@gmail.com

---

## ABSTRACT

**Purpose:** *This study aims to examine the influence of budget planning, budget implementation, regulations, and organizational commitment on the performance of regional government agencies in Banyuasin Regency.*

**Method:** *This research employed a quantitative approach. Data were collected through questionnaires distributed to employees involved in budget management within 32 Regional Government Organizations (OPD) in Banyuasin Regency. The population consisted of budget management officials, including Budget Users (PA), Budget User Authorities (KPA), Technical Activity Implementation Officers (PPTK), Financial Administration Officers (PPK), and Expenditure Treasurers. A purposive sampling technique was used, resulting in a sample of 160 respondents. Data were analyzed using multiple linear regression analysis with the assistance of IBM SPSS Statistics.*

**Finding:** *The results indicate that budget planning, budget implementation, regulations, and organizational commitment have a positive and significant effect on the performance of regional government agencies. Simultaneously, all independent variables significantly influence regional agency performance, indicating that effective budget management and strong organizational commitment contribute to improved organizational performance.*

**Novelty:** *This study contributes to the public sector accounting literature by developing an integrated model that simultaneously examines budget planning, budget implementation, regulations, and organizational commitment as determinants of regional government agency performance. Unlike previous studies that generally focus on one or two aspects of budget management, this research combines managerial, regulatory, and behavioral factors within a single framework and provides empirical evidence from regional government organizations in Banyuasin Regency. The findings offer a more comprehensive understanding of how budget governance and organizational commitment interact to improve public sector performance.*

## Keywords:

*Budget Planning; Budget Implementation; Regulation; Organizational Commitment; Regional Agency Performance.*

---

## PENDAHULUAN

Kinerja instansi daerah merupakan salah satu indikator penting dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kinerja yang baik mencerminkan kemampuan instansi dalam melaksanakan program, kegiatan, dan pelayanan publik secara efektif serta sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, kinerja instansi sangat dipengaruhi oleh kualitas perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi yang berlaku, serta komitmen organisasi dari aparatur pemerintah. Menurut Mahsun (2016), kinerja instansi pemerintah menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan kegiatan, program, dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, peningkatan kinerja instansi daerah menjadi salah satu fokus utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pengelolaan anggaran daerah yang efektif dimulai dari proses perencanaan anggaran yang matang. Perencanaan anggaran berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya yang tersedia sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara optimal

(Mardiasmo, 2018). Namun, berbagai penelitian menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan dalam proses perencanaan anggaran yang menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan riil dengan program yang dianggarkan. Selain itu, pelaksanaan anggaran yang tidak tepat waktu sering menjadi kendala dalam pencapaian target pembangunan daerah. Menurut Halim (2016), rendahnya kualitas pelaksanaan anggaran dapat mengakibatkan keterlambatan realisasi kegiatan serta menurunkan efektivitas penggunaan anggaran pemerintah.

Fenomena tersebut juga terjadi pada Pemerintah Kabupaten Banyuwasin. Berdasarkan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tingkat penyerapan anggaran Kabupaten Banyuwasin pada tahun 2021 mencapai 88,80%, meningkat menjadi 88,89% pada tahun 2022, kemudian mencapai 90% pada tahun 2023 dan 91% pada tahun 2024. Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih menemukan permasalahan berupa keterlambatan pelaksanaan kegiatan dan lemahnya pengawasan dalam pengelolaan anggaran daerah yang berpotensi memengaruhi kinerja instansi pemerintah daerah.

Selain faktor perencanaan dan pelaksanaan anggaran, regulasi juga memiliki peran penting dalam mendukung kinerja instansi daerah. Regulasi berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan daerah agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku (PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020). Regulasi yang jelas dan konsisten dapat mempermudah aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sedangkan perubahan regulasi yang terlalu sering dapat menimbulkan ketidakpastian dalam pelaksanaan program. Di sisi lain, komitmen organisasi menjadi faktor internal yang menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan. Robbins dan Judge (2017) menjelaskan bahwa pegawai yang memiliki komitmen tinggi akan menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan kesediaan untuk bekerja lebih baik demi mencapai tujuan organisasi.

Berbagai penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja instansi pemerintah masih menunjukkan hasil yang inkonsisten. Penelitian Abdullah dan Junita (2020) menemukan bahwa perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja organisasi pemerintah. Hasil serupa juga ditemukan oleh Nursela et al. (2022) yang menyatakan bahwa efektivitas pengelolaan anggaran mampu meningkatkan pencapaian kinerja organisasi sektor publik. Namun, penelitian Haslinda dan Majid (2016) menunjukkan bahwa tidak seluruh aspek pengelolaan anggaran memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Temuan yang berbeda juga ditunjukkan oleh beberapa penelitian terbaru yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan anggaran tidak hanya ditentukan oleh aspek teknis penganggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh kepatuhan terhadap regulasi, kapasitas organisasi, dan komitmen aparatur pemerintah.

Inkonsistensi hasil penelitian tersebut diduga terjadi karena adanya perbedaan karakteristik organisasi, kompleksitas regulasi, kualitas sumber daya manusia, serta perbedaan lingkungan kelembagaan pada masing-masing daerah. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu hanya menguji faktor perencanaan anggaran dan pelaksanaan anggaran secara terpisah, sedangkan penelitian yang mengintegrasikan aspek regulasi dan komitmen organisasi dalam satu model penelitian masih relatif terbatas, khususnya pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan penelitian (*research gap*) dengan menguji secara simultan pengaruh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuwasin.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena dapat memberikan gambaran empiris mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja instansi daerah dalam pengelolaan anggaran. Hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran, memperkuat implementasi regulasi, serta meningkatkan komitmen organisasi aparatur pemerintah. Selain itu, penelitian ini dapat memperkaya literatur di bidang akuntansi sektor publik dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji kinerja instansi pemerintah daerah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis maupun praktis dalam upaya meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

## LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### Stewardship Theory

*Stewardship Theory* dikemukakan oleh James H. Davis, F. David Schoorman, dan Lex Donaldson yang menjelaskan bahwa seorang pengelola organisasi akan bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang berupaya mencapai tujuan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Dalam sektor publik, teori ini menjelaskan bahwa aparatur pemerintah memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara efektif, efisien, dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat. Teori *stewardship* relevan dalam penelitian ini karena kinerja instansi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparatur dalam melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Semakin baik pengelolaan yang dilakukan, semakin tinggi pula kinerja instansi yang dihasilkan.

### Kinerja Instansi Daerah

Kinerja instansi daerah merupakan tingkat pencapaian hasil kerja organisasi pemerintah dalam melaksanakan tugas, fungsi, program, dan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Menurut Mahsun (2016), kinerja sektor publik merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang tertuang dalam perencanaan strategis. Kinerja instansi daerah menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas penyelenggaraan pemerintahan karena mencerminkan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pengukuran kinerja dilakukan melalui indikator efisiensi, efektivitas, produktivitas, kualitas pelayanan, serta pencapaian target program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Dalam perspektif pengelolaan keuangan daerah, kinerja instansi tidak hanya dipengaruhi oleh besarnya anggaran yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas pengelolaan anggaran tersebut. Organisasi pemerintah yang mampu merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan penggunaan anggaran secara baik akan lebih mudah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu, dukungan regulasi yang memadai dan komitmen organisasi yang kuat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan program pemerintah. Oleh karena itu, kinerja instansi daerah dalam penelitian ini diposisikan sebagai variabel dependen yang dipengaruhi oleh perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi.

### Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran merupakan proses penyusunan rencana keuangan yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan organisasi selama periode tertentu. Menurut Mardiasmo (2018), anggaran sektor publik merupakan alat perencanaan dan pengendalian yang berfungsi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif guna mencapai tujuan organisasi. Perencanaan anggaran yang baik harus mencerminkan kebutuhan organisasi, memperhatikan prioritas pembangunan, serta disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dalam organisasi pemerintah daerah, perencanaan anggaran diwujudkan melalui penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi dasar pelaksanaan program dan kegiatan.

Kualitas perencanaan anggaran sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah. Perencanaan yang disusun secara tepat akan meminimalkan terjadinya pemborosan, ketidaksesuaian program, maupun keterlambatan pelaksanaan kegiatan. Sebaliknya, perencanaan yang kurang matang dapat menyebabkan rendahnya tingkat penyerapan anggaran dan tidak tercapainya target kinerja organisasi. Berdasarkan *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah yang bertindak sebagai pengelola organisasi akan berupaya menyusun perencanaan anggaran secara optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, semakin baik perencanaan anggaran yang dilakukan, maka semakin tinggi pula kinerja instansi daerah yang dapat dicapai.

### Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Daerah

Perencanaan anggaran merupakan proses strategis dalam menentukan prioritas program dan alokasi sumber daya organisasi. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah sebagai *steward* berupaya menyusun perencanaan anggaran yang efektif untuk memastikan tercapainya tujuan organisasi dan kepentingan publik. Perencanaan anggaran yang berkualitas memungkinkan

organisasi mengalokasikan sumber daya secara tepat sehingga program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Berdasarkan *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah sebagai *steward* memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya publik secara optimal demi mencapai tujuan organisasi. Perencanaan anggaran yang disusun secara partisipatif, realistis, dan sesuai kebutuhan organisasi mencerminkan upaya *steward* dalam memastikan bahwa sumber daya yang tersedia dapat digunakan secara efektif untuk meningkatkan kinerja instansi. Oleh karena itu, semakin baik kualitas perencanaan anggaran yang dilakukan, semakin tinggi pula kinerja instansi daerah yang dihasilkan.

### **H1: Perencanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi daerah. Pelaksanaan Anggaran**

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap implementasi dari rencana anggaran yang telah disusun sebelumnya. Menurut Halim (2016), pelaksanaan anggaran adalah proses penggunaan sumber daya keuangan untuk membiayai program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen anggaran. Keberhasilan pelaksanaan anggaran ditandai dengan ketepatan waktu realisasi kegiatan, kesesuaian penggunaan dana dengan rencana, serta tercapainya target yang telah ditetapkan. Dalam sektor publik, pelaksanaan anggaran menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pelaksanaan anggaran yang efektif akan mendorong tercapainya hasil kerja yang optimal. Sebaliknya, keterlambatan realisasi anggaran dapat menghambat pelaksanaan program dan menurunkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah sebagai pengelola organisasi memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kualitas pelaksanaan anggaran yang baik diharapkan mampu meningkatkan produktivitas organisasi serta mendukung pencapaian kinerja instansi daerah secara keseluruhan.

### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Daerah**

Pelaksanaan anggaran merupakan tahap implementasi dari rencana anggaran yang telah disusun. *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa aparatur pemerintah bertanggung jawab memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, efisien, dan sesuai tujuan organisasi. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu dan sesuai rencana akan mendukung tercapainya output dan outcome organisasi.

*Stewardship Theory* menjelaskan bahwa aparatur pemerintah tidak hanya bertugas menyusun anggaran, tetapi juga bertanggung jawab memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai rencana. Sebagai *steward*, aparatur akan berupaya memaksimalkan penggunaan anggaran secara efisien dan tepat waktu untuk menghasilkan output serta outcome yang sesuai dengan tujuan organisasi. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran yang efektif diharapkan mampu meningkatkan kinerja instansi daerah.

### **H2: Pelaksanaan anggaran berpengaruh positif terhadap kinerja instansi daerah. Regulasi**

Regulasi merupakan seperangkat aturan yang menjadi pedoman bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam konteks pemerintahan daerah, regulasi berfungsi untuk mengatur proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah. Menurut Bastian (2019), regulasi yang jelas akan menciptakan kepastian hukum dan memberikan arah bagi organisasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Regulasi yang baik juga dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas pengelolaan sumber daya publik.

Keberadaan regulasi yang memadai akan membantu aparatur pemerintah dalam memahami prosedur kerja dan standar yang harus dipatuhi. Sebaliknya, regulasi yang kurang jelas atau sering berubah dapat menimbulkan ketidakpastian dan menghambat pelaksanaan program pemerintah. Dalam perspektif *Stewardship Theory*, regulasi menjadi instrumen yang membantu aparatur pemerintah menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan organisasi dan mendorong peningkatan kinerja instansi daerah.

## **Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Instansi Daerah**

Regulasi merupakan instrumen yang memberikan pedoman bagi organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam *Stewardship Theory*, regulasi membantu *steward* melaksanakan tugas secara akuntabel dan sesuai kepentingan publik. Regulasi yang jelas dan konsisten mampu menciptakan kepastian hukum serta meningkatkan efektivitas tata kelola organisasi.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, regulasi berfungsi sebagai mekanisme yang membantu *steward* menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara akuntabel. Kepatuhan terhadap regulasi menunjukkan komitmen aparatur pemerintah dalam menjaga kepentingan publik dan meminimalkan risiko penyimpangan. Oleh karena itu, semakin baik implementasi regulasi dalam organisasi pemerintah, semakin efektif pencapaian kinerja instansi daerah.

### **H3: Regulasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi daerah.**

#### **Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan tingkat keterikatan dan loyalitas individu terhadap organisasi tempatnya bekerja. Menurut Robbins dan Judge (2017), komitmen organisasi menunjukkan sejauh mana seorang pegawai mengidentifikasi dirinya dengan organisasi serta memiliki keinginan untuk tetap menjadi bagian dari organisasi tersebut. Pegawai yang memiliki komitmen tinggi cenderung bekerja lebih keras, memiliki rasa tanggung jawab yang besar, serta berupaya memberikan kontribusi terbaik bagi organisasi. Dalam sektor publik, komitmen organisasi sangat penting karena berkaitan dengan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Komitmen organisasi yang kuat akan menciptakan motivasi bagi aparatur pemerintah untuk melaksanakan tugas secara optimal. Pegawai yang memiliki rasa memiliki terhadap organisasi akan lebih mudah menerima perubahan, mematuhi aturan, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan *Stewardship Theory*, individu yang memiliki komitmen tinggi akan mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, komitmen organisasi dipandang sebagai faktor yang mampu meningkatkan efektivitas kerja dan kinerja instansi daerah.

## **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Daerah**

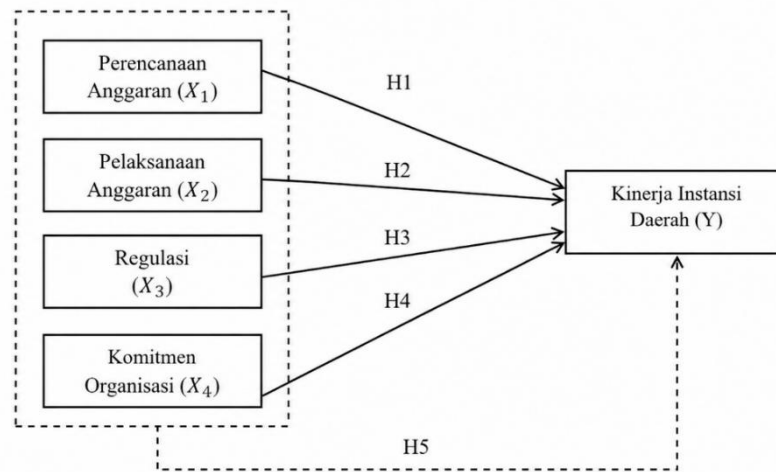
Komitmen organisasi mencerminkan tingkat keterikatan pegawai terhadap organisasi tempat mereka bekerja. *Stewardship Theory* berasumsi bahwa individu akan mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Aparatur yang memiliki komitmen tinggi cenderung menunjukkan loyalitas, tanggung jawab, dan motivasi yang lebih besar dalam mencapai tujuan organisasi.

*Stewardship Theory* berasumsi bahwa individu secara alami lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Komitmen organisasi yang tinggi mencerminkan kesediaan aparatur pemerintah untuk bekerja secara maksimal dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, semakin tinggi komitmen organisasi yang dimiliki aparatur pemerintah, semakin tinggi pula kinerja instansi daerah yang dapat dicapai.

### **H4: Komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja instansi daerah.**

#### **Model Penelitian**

Model penelitian ini dibangun berdasarkan *Stewardship Theory* yang menempatkan aparatur pemerintah sebagai pengelola (*steward*) yang bertanggung jawab mengoptimalkan sumber daya organisasi demi mencapai tujuan publik. Dalam penelitian ini, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi diposisikan sebagai faktor yang memengaruhi kinerja instansi daerah. Model ini digunakan untuk menguji hubungan langsung masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen, yaitu kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuwangi.



**Gambar 1**  
**Model Penelitian**

**METODOLOGI PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode asosiatif yang bertujuan untuk menguji serta mengetahui tingkat hubungan dan pengaruh antara variabel independen yang terdiri atas Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Regulasi (X3), dan Komitmen Organisasi (X4) terhadap variabel dependen yaitu Kinerja Instansi Daerah (Y). Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan secara langsung dari para responden melalui penyebaran instrumen kuesioner terstruktur. Setiap item pertanyaan di dalam kuesioner disusun berdasarkan indikator operasional dari masing-masing variabel dan diukur menggunakan skala Likert lima poin, yang dimulai dari skala 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) hingga skala 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur sipil negara (ASN) maupun pejabat pengelola keuangan daerah yang terlibat secara teknis dalam pengelolaan anggaran pada 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Komposisi populasi ini meliputi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), dan Bendahara Pengeluaran. Pemilihan populasi ini didasarkan atas pertimbangan kompetensi dan kapasitas jabatan mereka yang memiliki pemahaman komprehensif, legalitas, serta akses langsung terhadap proses perencanaan, eksekusi anggaran, maupun pelaporan capaian kinerja pada masing-masing instansi.

Teknik pengambilan sampel yang diterapkan adalah purposive sampling, yaitu penentuan sampel dengan menetapkan kriteria-kriteria khusus yang relevan demi menjaga objektivitas hasil penelitian. Kriteria sampel yang ditetapkan dalam riset ini meliputi: (1) Aparatur pengelola keuangan yang terlibat aktif dan langsung dalam siklus penganggaran OPD Kabupaten Banyuasin, dan (2) Memiliki masa kerja atau pengalaman minimal selama 1 (satu) tahun pada posisi pengelolaan anggaran tersebut. Berdasarkan kriteria purposive sampling tersebut, diperoleh total sampel akhir sebanyak 160 responden yang merepresentasikan keterwakilan merata dari seluruh 32 OPD yang ada (dengan alokasi 5 responden per OPD).

Untuk memberikan transparansi alat ukur, operasionalisasi dari indikator setiap variabel beserta sumber rujukan instrumen penelitian disajikan secara detail pada Tabel 1 berikut:

**Tabel 1**  
**Operasional Variabel Penelitian**

Variabel Penelitian	Indikator Operasional	Jumlah Item	Sumber Instrumen
Kinerja Instansi Daerah (Y)	1. Efisiensi penggunaan anggaran 2. Efektivitas pencapaian target 3. Produktivitas kerja	14	Mahsun (2016); Mardiasmo (2018)

Variabel Penelitian	Indikator Operasional	Jumlah Item	Sumber Instrumen
	4. Kualitas pelayanan publik 5. Pencapaian visi dan misi organisasi		
Perencanaan Anggaran (X1)	1. Ketepatan waktu penyusunan RKA 2. Kesesuaian dengan kebutuhan riil OPD 3. Kejelasan prioritas program pembangunan 4. Partisipasi aparatur pengelola anggaran	7	Nursela et al. (2022)
Pelaksanaan Anggaran (X2)	1. Ketepatan waktu realisasi belanja (jadwal triwulan) 2. Efisiensi pengadaan barang dan jasa 3. Kelancaran proses pencairan dana operasional 4. Ketepatan penggunaan dana sesuai rencana	5	Halim (2016); Nursela et al. (2022)
Regulasi (X3)	1. Kejelasan dan konsistensi aturan formal 2. Kemudahan pemahaman prosedur kerja/standar 3. Intensitas sosialisasi mekanisme pengelolaan keuangan 4. Kepatuhan terhadap koridor hukum	5	Bastian (2019); Setiawan et al. (2022)
Komitmen Organisasi (X4)	1. Keterikatan emosional (affective commitment) 2. Loyalitas dan rasa memiliki terhadap instansi 3. Kesiediaan bekerja melebihi standar operasional 4. Tanggung jawab dan disiplin terhadap pencapaian target	6	Robbins & Judge (2017)

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Sebelum kuesioner disebarakan secara penuh kepada seluruh target sampel penelitian, instrumen diuji terlebih dahulu melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan akurasi dan konsistensi pengukuran teknis. Uji validitas dilakukan dengan menganalisis korelasi Pearson Product Moment, di mana nilai  $r$ -hitung dari masing-masing butir pernyataan dibandingkan dengan nilai  $r$ -tabel pada tingkat signifikansi alpha 5% (0,05) dengan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $N-2$ . Berdasarkan jumlah sampel sebanyak 160 responden, maka batas ambang nilai  $r$ -tabel adalah sebesar 0,155. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa seluruh item kuisisioner dari variabel independen maupun dependen memiliki nilai  $r$ -hitung yang berada jauh di atas nilai  $r$ -tabel ( $r$ -hitung > 0,155), yang membuktikan bahwa seluruh butir indikator dinyatakan valid secara empiris.

Selanjutnya, pengujian reliabilitas instrumen dievaluasi dengan menggunakan koefisien internal Cronbach's Alpha. Kuesioner suatu variabel penelitian dikategorikan memiliki tingkat keandalan yang sangat baik (reliabel) apabila nilai koefisien Cronbach's Alpha yang dihasilkan bernilai lebih besar dari batas kritis standar yaitu 0,70. Hasil ringkasan dari potret uji validitas dan keandalan instrumen data primer yang diolah disajikan secara lengkap pada Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**

Variabel Penelitian	Hasil Uji Validitas Instrumen			
	Jumlah Item	Rentang Nilai r-hitung	Koefisien Cronbach's Alpha	Status Kualitas
Perencanaan Anggaran (X1)	5	0,541 – 0,782	0,812	Valid & Reliabel
Pelaksanaan Anggaran (X2)	5	0,612 – 0,801	0,845	Valid & Reliabel
Regulasi (X3)	5	0,498 – 0,765	0,789	Valid & Reliabel
Komitmen Organisasi (X4)	6	0,554 – 0,819	0,856	Valid & Reliabel
Kinerja Instansi Daerah (Y)	10	0,511 – 0,834	0,892	Valid & Reliabel

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil Analisis Data

#### Deskripsi Data dan Karakteristik Responden

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada para pegawai pengelola keuangan di 32 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 160 kuesioner telah didistribusikan secara langsung kepada responden dengan target merata, yakni masing-masing OPD menerima 5 kuesioner. Tingkat pengembalian (*response rate*) kuesioner dalam penelitian ini mencapai 100%, di mana seluruh instrumen kembali dalam keadaan terisi lengkap dan valid untuk digunakan dalam tahapan analisis statistik selanjutnya. Karakteristik responden yang berpartisipasi meliputi pejabat struktural dan fungsional penting, seperti Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta Bendahara Pengeluaran.

Profil demografis responden memberikan gambaran representatif mengenai aparatur pengelola keuangan daerah di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan komposisi jenis kelamin, mayoritas responden adalah perempuan sebanyak 90 orang (56%), sedangkan laki-laki berjumlah 70 orang (44%). Ditinjau dari rentang usia, porsi terbesar berada pada kelompok usia produktif 31-40 tahun dengan persentase mencapai 34%. Berdasarkan tingkat pendidikan formal terakhir, profil aparatur didominasi oleh lulusan Sarjana Terapan/S1 sebanyak 75 orang (47%) dan Magister/S2 sebanyak 55 orang (34%). Sementara itu, latar belakang pengalaman kerja menunjukkan bahwa mayoritas responden telah memiliki masa pengabdian selama 5-10 tahun dengan persentase sebesar 41%.

#### Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif diterapkan untuk memberikan ringkasan empiris mengenai sebaran data dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel dalam penelitian ini mencakup empat variabel independen, yaitu Perencanaan Anggaran (X1), Pelaksanaan Anggaran (X2), Regulasi (X3), dan Komitmen Organisasi (X4), serta satu variabel dependen yaitu Kinerja Instansi Daerah (Y).

**Tabel 3**  
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Mean	Std. Deviation
Perencanaan Anggaran	160	17,00	35,00	29,4063	4,09217
Pelaksanaan Anggaran	160	5,00	25,00	13,4313	4,18987
Regulasi	160	0,00	25,00	19,0375	3,65817
Komitmen Organisasi	160	12,00	30,00	24,2687	3,75126

Kinerja Instansi Daerah	160	28,00	70,00	58,1187	7,86391
-------------------------	-----	-------	-------	---------	---------

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

Berdasarkan Tabel 1, hasil pengujian menunjukkan nilai rata-rata (*mean*) untuk setiap variabel lebih besar daripada nilai standar deviasinya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa data yang dikumpulkan memiliki tingkat variasi yang rendah atau dispersi data cenderung homogen tanpa adanya fluktuasi nilai ekstrem. Variabel Perencanaan Anggaran mencatatkan nilai *mean* sebesar 29,40, sedangkan Pelaksanaan Anggaran memiliki nilai *mean* sebesar 13,43. Selanjutnya, variabel Regulasi memperoleh rata-rata sebesar 19,03, variabel Komitmen Organisasi sebesar 24,26, dan variabel Kinerja Instansi Daerah mencatatkan nilai rata-rata tertinggi, yaitu mencapai 58,11.

### Pengujian Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, model regresi diuji untuk memastikan terpenuhinya asumsi klasik. Uji normalitas menggunakan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov* menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,200 > 0,05$ , yang berarti residual model berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai *Tolerance* seluruh variabel independen berada di atas 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) secara konsisten berada di bawah angka 10, sehingga dinyatakan bebas multikolinearitas. Selain itu, grafik *scatterplot* memperlihatkan titik-titik data yang menyebar secara acak tanpa membentuk pola geometris tertentu, yang mengonfirmasi tidak terjadinya masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang diajukan.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Jenis Uji Asumsi Klasik	Indikator Pengujian	Nilai Statistik	Kriteria Kelayakan	Status Pemenuhan
Uji Normalitas	Asymp. Sig. (2-tailed) (One-Sample Kolmogorov-Smirnov)	0,084	$> 0,05$	Berdistribusi Normal
Uji Multikolinearitas	<b>Perencanaan Anggaran (X1)</b> - Nilai Tolerance - Nilai VIF	0,642 1,558	$> 0,10$ $< 10,0$	Bebas Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas	<b>Pelaksanaan Anggaran (X2)</b> - Nilai Tolerance - Nilai VIF	0,589 1,698	$> 0,10$ $< 10,0$	Bebas Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas	<b>Regulasi (X3)</b> - Nilai Tolerance - Nilai VIF	0,711 1,406	$> 0,10$ $< 10,0$	Bebas Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas	<b>Komitmen Organisasi (X4)</b> - Nilai Tolerance - Nilai VIF	0,554 1,805	$> 0,10$ $< 10,0$	Bebas Multikolinearitas
Uji Heteroskedastisitas	Sig. Uji Glejser: -Perencanaan Anggaran (X1) -Pelaksanaan	0,342 0,512 0,198	$> 0,05$ $> 0,05$ $> 0,05$	Bebas Heteroskedastisitas

Jenis Uji Asumsi Klasik	Indikator Pengujian	Nilai Statistik	Kriteria Kelayakan	Status Pemenuhan
	Anggaran (X2) - Regulasi (X3) - Komitmen Organisasi (X4)	0,423	> 0,05	

Sumber: Data Primer Diolah (2026)

### Pengujian Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dilakukan melalui analisis regresi linear berganda menggunakan perangkat SPSS. Berdasarkan hasil pengujian parsial (Uji t), diperoleh bukti bahwa keempat variabel independen, yaitu Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Regulasi, dan Komitmen Organisasi, secara individu memiliki nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini mengindikasikan bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kinerja Instansi Daerah. Sementara itu, hasil pengujian simultan (Uji F) menghasilkan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$  yang berarti seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen dengan kontribusi nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) yang kuat.

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Hipotesis**

Variabel Independen	Koefisien Regresi (Beta)	t-hitung	Signifikansi (Sig.)	Keterangan Hipotesis
<b>Konstanta</b>	4,212	2,845	0,005	—
Perencanaan Anggaran (X1)	0,284	3,412	0,001	<b>H1 Diterima (Signifikan)</b>
Pelaksanaan Anggaran (X2)	0,312	3,895	0,000	<b>H2 Diterima (Signifikan)</b>
Regulasi (X3)	0,195	2,465	0,015	<b>H3 Diterima (Signifikan)</b>
Komitmen Organisasi (X4)	0,354	4,218	0,000	<b>H4 Diterima (Signifikan)</b>

### Uji Statistik Model / Ringkasan Regresi:

- Nilai R Square ( $R^2$ ) = 0,618
- Nilai Adjusted R Square = 0,608
- F-hitung Model = 62,554 (Sig. 0,000) -> Model Layak / Signifikan Simultan
- Jumlah Sampel Akhir (N) = 160 Responden

### Interpretasi dan Analisis Verifikasi Data

**Uji Signifikansi Parsial (Uji t):** Seluruh nilai signifikansi (Sig.) untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 berada jauh di bawah nilai batas kritis kesalahan 0,05. Hal ini menunjukkan bukti empiris yang valid secara parsial bahwa kematangan perencanaan anggaran, ketepatan pelaksanaan anggaran, kejelasan koridor regulasi, serta tingginya komitmen organisasi aparatur pengelola keuangan

berkorelasi linier dan signifikan positif dalam meningkatkan performa Kinerja Instansi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwasin.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F): Hasil uji korelasi bersama menghasilkan nilai F-hitung sebesar 62,554 dengan tingkat signifikansi model sebesar 0,000 ( $< 0,05$ ). Hasil ini mengonfirmasi secara kuat keandalan model linier regresi berganda (goodness of fit) di mana keempat variabel bebas tersebut secara simultan merupakan determinan penting dalam menggerakkan pencapaian indikator kinerja instansi pemerintah daerah.

Koefisien Determinasi ( $R^2$ ): Nilai Adjusted R Square sebesar 0,608 mengindikasikan kontribusi penjelasan model regresi ini adalah sebesar 60,8%. Artinya, fluktuasi capaian efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas Kinerja Instansi Daerah Kabupaten Banyuwasin mampu diprediksi oleh keempat variabel ini, sementara sisa persentase sebesar 39,2% dipengaruhi oleh variabel di luar cakupan model (seperti kejelasan sasaran anggaran, implementasi sistem IT manajemen, ataupun kompetensi teknis SDM).

### **Pembahasan Hasil Penelitian**

#### **Pengaruh Perencanaan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Daerah**

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa perencanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuwasin. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin baik proses perencanaan anggaran yang dilakukan oleh OPD, maka semakin tinggi pula tingkat kinerja instansi daerah yang dihasilkan.

Temuan tersebut sejalan dengan *Stewardship Theory* yang menjelaskan bahwa aparatur pemerintah sebagai steward memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya organisasi secara efektif demi mencapai tujuan publik. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, perencanaan anggaran yang baik memungkinkan organisasi menetapkan prioritas program secara tepat, mengalokasikan sumber daya sesuai kebutuhan, serta meminimalkan terjadinya pemborosan anggaran. Dengan demikian, perencanaan anggaran menjadi dasar dalam pencapaian target organisasi dan peningkatan kinerja instansi daerah.

Secara empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa OPD Kabupaten Banyuwasin telah menyusun anggaran berdasarkan kebutuhan program kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan. Perencanaan yang matang mempermudah pelaksanaan kegiatan sehingga program dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan output yang sesuai dengan sasaran organisasi. Sebaliknya, perencanaan yang kurang baik dapat menyebabkan ketidaksesuaian antara kebutuhan program dan alokasi anggaran sehingga menghambat pencapaian kinerja.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Abdullah dan Junita (2020), Nursela et al. (2022), dan beberapa penelitian sektor publik lainnya yang menyimpulkan bahwa perencanaan anggaran merupakan faktor penting dalam meningkatkan kinerja organisasi pemerintah.

#### **Pengaruh Pelaksanaan Anggaran terhadap Kinerja Instansi Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuwasin. Berdasarkan *Stewardship Theory*, aparatur pemerintah tidak hanya bertanggung jawab dalam menyusun anggaran, tetapi juga memastikan bahwa anggaran tersebut dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan tujuan organisasi. Pelaksanaan anggaran yang baik mencerminkan kemampuan organisasi dalam mengubah rencana menjadi tindakan nyata yang menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Secara empiris, pengaruh positif pelaksanaan anggaran menunjukkan bahwa OPD Kabupaten Banyuwasin mampu merealisasikan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, kelancaran pencairan dana, serta kesesuaian realisasi anggaran dengan target program memungkinkan instansi mencapai indikator kinerja yang telah ditentukan. Dengan kata lain, keberhasilan pelaksanaan anggaran berkontribusi langsung terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

### **Pengaruh Regulasi terhadap Kinerja Instansi Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuasin.

Dalam perspektif *Stewardship Theory*, regulasi berfungsi sebagai pedoman yang membantu aparatur pemerintah menjalankan tugas secara akuntabel dan sesuai dengan kepentingan publik. Regulasi yang jelas dan mudah dipahami akan mengurangi ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas sehingga aparatur dapat bekerja lebih efektif.

Secara empiris, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa regulasi pengelolaan keuangan daerah yang berlaku telah memberikan pedoman yang cukup jelas bagi OPD Kabupaten Banyuasin dalam melaksanakan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Kejelasan aturan tersebut membantu mengurangi kesalahan administrasi, meningkatkan kepatuhan aparatur, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Kondisi ini pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan kinerja instansi daerah.

### **Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Instansi Daerah**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuasin. Menurut *Stewardship Theory*, individu cenderung mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan kepentingan pribadi. Oleh karena itu, aparatur yang memiliki komitmen organisasi tinggi akan berupaya memberikan kontribusi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aparatur pada OPD Kabupaten Banyuasin memiliki rasa tanggung jawab, loyalitas, dan keterikatan yang tinggi terhadap organisasi. Kondisi tersebut mendorong pegawai untuk bekerja lebih optimal, menyelesaikan tugas dengan baik, serta berpartisipasi aktif dalam pencapaian target organisasi. Tingginya komitmen organisasi juga meningkatkan koordinasi dan kerja sama antarpegawai sehingga mendukung peningkatan kinerja instansi daerah secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa faktor manajerial (perencanaan dan pelaksanaan anggaran), faktor kelembagaan (regulasi), dan faktor perilaku organisasi (komitmen organisasi) merupakan determinan penting dalam meningkatkan kinerja instansi daerah. Temuan ini memperkuat *Stewardship Theory* yang menyatakan bahwa aparatur pemerintah sebagai steward akan berupaya mengelola sumber daya organisasi secara optimal untuk mencapai tujuan publik. Dengan demikian, peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi, dan penguatan komitmen organisasi menjadi strategi yang penting dalam meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuasin.

### **KESIMPULAN dan SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa secara parsial perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi daerah pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Banyuasin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran yang baik mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui alokasi sumber daya yang tepat dan terarah. Pelaksanaan anggaran yang efektif terbukti meningkatkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja instansi daerah. Regulasi yang jelas dan diterapkan secara konsisten mampu memperkuat kepatuhan aparatur serta meningkatkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selain itu, komitmen organisasi yang tinggi mendorong aparatur untuk bekerja secara optimal dalam mencapai tujuan organisasi. Secara simultan, perencanaan anggaran, pelaksanaan anggaran, regulasi, dan komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja instansi daerah, yang menunjukkan bahwa kombinasi faktor manajerial, kelembagaan, dan perilaku organisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja instansi daerah Kabupaten Banyuasin.

Memperhatikan temuan penelitian, disarankan kepada Pemerintah Kabupaten Banyuasin dan seluruh Organisasi Perangkat Daerah untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan anggaran melalui penyusunan program dan kegiatan yang lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil.

Efektivitas pelaksanaan anggaran juga perlu ditingkatkan melalui penguatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, percepatan realisasi anggaran, serta optimalisasi koordinasi antarunit kerja. Selain itu, pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi regulasi melalui sosialisasi, pendampingan, dan pengawasan yang berkelanjutan agar seluruh aparatur memiliki pemahaman yang baik terhadap ketentuan yang berlaku. Upaya peningkatan komitmen organisasi juga perlu dilakukan melalui pengembangan budaya kerja yang profesional, pemberian motivasi, penghargaan atas kinerja, serta peningkatan keterlibatan pegawai dalam proses pengambilan keputusan organisasi. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan kinerja instansi daerah secara berkelanjutan.

Mengingat penelitian ini hanya dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Banyuwangi dan menggunakan empat variabel independen, penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian pada tingkat kabupaten, provinsi, maupun instansi pemerintah lainnya sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kinerja instansi daerah, seperti kompetensi sumber daya manusia, kepemimpinan, budaya organisasi, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, dan kualitas pelayanan publik. Selain itu, penggunaan pendekatan campuran (*mixed methods*) yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif sangat disarankan agar mampu memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kinerja instansi daerah serta dinamika pengelolaan organisasi sektor publik..

## REFERENSI

- Abdullah, S., & Junita, A. (2020). Determinan kinerja anggaran pada organisasi perangkat daerah. *Akuntabilitas*, 13(1), 1–16.
- Bastian, I. (2019). *Akuntansi sektor publik di Indonesia*. Salemba Empat.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship theory or agency theory: CEO governance and shareholder returns. *Australian Journal of Management*, 16(1), 49–64.
- Halim, A. (2016). *Akuntansi sektor publik: Akuntansi keuangan daerah*. Salemba Empat.
- Haslinda, & Majid, J. (2016). Pengaruh perencanaan anggaran dan evaluasi anggaran terhadap kinerja organisasi dengan standar biaya sebagai variabel moderating pada pemerintah daerah Kabupaten Wajo. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 2(2), 1–20.
- Mahsun, M. (2016). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi sektor publik*. Andi.
- Nursela, N., Lestari, R., & Sukarmanto, E. (2022). Pengaruh efektivitas pengelolaan anggaran terhadap pencapaian kinerja organisasi sektor publik. *Bandung Conference Series: Accountancy*, 2(1), 245–256.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2017). *Organizational behavior* (17th ed.). Pearson Education.
- Setiawan, A., Rahayu, S., & Mansur, F. (2022). Pengaruh pemahaman regulasi dan komitmen terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Universitas Jambi*, 7(3), 180–194.